

**RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA – SKPD)
TAHUN 2013 - 2018**



DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN BANYUMAS
2013

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN) dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai wujud perencanaan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu 5 tahun.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Oleh karena itu penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD yang telah disepakati bersama dengan mempertimbangkan visi, misi SKPD serta perkembangan lingkungan eksternal strategis baik di tingkat daerah maupun nasional termasuk pengaruh globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masing-masing saling berpengaruh dan lingkungan internal SKPD.

Untuk mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tidak tertinggal dari daerah lain. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sektor Industri, Perdagangan serta sektor informal Pedagang Kaki Lima merupakan pelaku ekonomi dalam perekonomian daerah dan seharusnya menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar adanya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dituntut untuk maju dan memiliki keunggulan yang berdaya saing.

Guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas berperan menyusun kebijakan di bidang industri, perdagangan, pasar, koperasi dan UKM. Hal tersebut menuntut adanya partisipasi dari semua pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam mewujudkan tujuan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah. Semoga Rencana Strategis ini dapat mendukung terwujudnya industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang maju dan berdaya saing.

Purwokerto, Desember 2013
KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. DJOKO WIKANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630408 198810 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Landasan Hukum.....	3
D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD.....	6
A. Struktur Organisasi	6
B. Susunan Kepegawaian.....	7
C. Tugas dan Fungsi.....	8
D. Hal Lain yang Dianggap Penting.....	9
E. Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.....	13
III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	15
A. Kondisi Umum Daerah.....	15
B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan.....	21
IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	25
A. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	25
B. Tujuan dan Sasaran.....	26
C. Strategi.....	29
D. Kebijakan.....	29
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	32
VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	43
VII. PENUTUP.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang terpadu, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut merupakan pelaksanaan amanat Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wujud perekonomian yang dibangun adalah terciptanya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang lebih baik dan lebih merata melalui upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi regional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Upaya tersebut berbasis pada sumberdaya lokal (alam dan manusia) yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, sektor pertanian sebagai basis perekonomian rakyat yang menghidupi sebagian besar penduduk Kabupaten Banyumas perlu didorong oleh pembangunan industri yang menyediakan input produksi dan mengolah hasil-hasil pertanian (agro industri). Sedangkan aktivitas perdagangan di Kabupaten Banyumas yang meliputi perdagangan barang-barang produksi antara lain barang produksi hasil pertanian, hasil industri dan hasil penggalian serta perdagangan antar daerah masih mempunyai peluang untuk lebih ditingkatkan. Kabupaten Banyumas memiliki pusat perdagangan di Purwokerto, Ajibarang dan Wangon yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan Kabupaten Banyumas. Infrastruktur perdagangan berupa pasar yang menjadi pusat bertemunya pedagang dan pembeli merupakan aset potensial untuk ditingkatkan.

Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk itu perlu pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan.

Peran KUMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari : 1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor ; 2) penyedia lapangan kerja terbesar ; 3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat ; 4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi ; serta 5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran KUMKM ini sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Untuk itu perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, sehat, dinamis dan berdaya saing.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 disusun berpedoman pada Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berbagai kebijakan / regulasi lain yang secara langsung atau tidak langsung memiliki keterkaitan dengan penyusunan perencanaan pembangunan bidang industri, perdagangan, pasar, koperasi dan UKM di Kabupaten Banyumas.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 berfungsi sebagai dokumen publik yang diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah sektor industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Proses penyusunan RENSTRA ini dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap *stakeholders* di Kabupaten Banyumas.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 akan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan menjadi tolak ukur kinerja Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat sektor industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2018 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018)

2. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas ini disusun dengan tujuan :

- a. Memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan Pemerintah (aparatur Dinas Perindagkop) tentang mekanisme, proses dan substansi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan pada sektor industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah selama lima tahun dengan baik.
- b. Sebagai acuan dalam perencanaan kerja yang komprehensif periode tahun 2013-2018, sehingga terwujud kejelasan tentang arah kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas selama tahun 2013-2018
- c. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas, dengan harapan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis sehingga memberikan hasil yang optimal
- d. Sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas selama periode lima tahun (2013-2018)
- e. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislative dan *stakeholders* pembangunan dan pemberdayaan pada sektor industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah terhadap program-program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu lima tahun.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.
- 6) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Peraturan Daerah Nomor : 26 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
- 8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 21 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas

D. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Sebagai tindak lanjut disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang akan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

Renstra tersebut disusun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada di bidang pembangunan industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah. Renstra ini diperlukan dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas bidang industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah. Renstra ini memuat

kebijakan pembangunan strategis secara rinci dan terukur guna mewujudkan visi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum yang digunakan, hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan

Bab II Gambaran Umum Pelayanan SKPD

Dalam bab ini dijelaskan tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, susunan kepegawaian dan perlengkapan serta tugas dan fungsi dan hal-hal lain yang dianggap penting

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam bab ini dijelaskan tentang kondisi umum daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja dan kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai visi dan misi SKPD, tujuan yang merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur, strategi yang diwujudkan dalam arah dan kebijakan yang diambil dalam menentukan konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dalam bab ini dijelaskan mengenai rencana program dan kegiatan yang bersifat umum beserta implikasi pendanaan dan sumbernya yang dirinci menurut kerangka anggaran dan kerangka regulasi

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Dalam bab ini dijelaskan mengenai indikator kinerja SKPD berupa indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD.

Bab VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas terdiri dari adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Pertanian dan Kehutanan
 - b. Seksi Industri Logam dan Elektronik
 - c. Seksi Industri Kerajinan dan Aneka
4. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Distribusi dan Informasi
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Teknik Kemetrollogian
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Usaha Perdagangan
5. Bidang Pasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Pasar
 - b. Seksi Pendapatan Pasar
 - c. Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima
6. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - b. Seksi Pengawasan Koperasi
 - c. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi
7. Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - b. Seksi Pengawasan Usaha Kecil Menengah
 - c. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a. UPT Pasar Wage;
 - b. UPT Pasar Ajibarang;
 - c. UPT Pasar Wangon;
 - d. UPT Pasar Sokaraja

B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Saat ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas mempunyai 373 pegawai yang terdiri dari 276 orang PNS, 11 orang Honorer PTT dan 86 orang Tenaga Honorer Pociokan. Gambaran distribusi jumlah pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013 menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai			Jumlah
		PNS	PTT	POCOKAN	
1	PASCA SARJANA/S2	7	-	-	7
2	SARJANA	36	-	2	38
3	DIPLOMA III	5	1	1	7
4	SLTA	100	-	19	119
5	SLTP	62	-	42	104
6	SD	66	10	22	98
	J u m l a h	276	11	86	373

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013 menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Pegawai			Jumlah
		PNS	PTT	POCOKAN	
1	Laki – laki	202	8	85	295
2	Perempuan	74	3	1	78
3	J u m l a h	276	11	86	373

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 menurut Eselon dan Fungsional

No	Tingkat Eselon / Fungsional	Jumlah
1	II b	1
2	III a	1
3	III b	5
4	IV a	22
5	IV b	3
	<i>J u m l a h</i>	32

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 21 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, maka Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas biadng perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas, fungsi dan tata kerjanya

D. HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING

Pada sub bab ini memuat beberapa pengertian dan istilah yang terkait dengan industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah sebagai berikut :

1. **Unit Pasar** adalah Unit Pelaksana yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.
2. **Pasar** adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas pelataran, bangunan berbentuk Ruko (Rumah Toko), Toko/Kios, Los, Halaman Pasar dan Fasilitas pasar yang dikelola / milik Pemerintah Daerah.
3. **Pedagang Kaki Lima (PKL)** adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan / trotoar dan tempat – tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya (Perda No.3 tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima). PKL merupakan usaha mikro perorangan (bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum) yang melakukan penjualan dengan menggunakan bagian jalan / trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat definisi sebagai berikut :

4. **Usaha Mikro** adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan criteria memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; penjualan bersih tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
5. **Usaha Kecil** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima Ratus Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; memiliki penjualan bersih tahunan mulai dari Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. **Usaha Menengah** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi criteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. Rp. 500.000.000,00 (lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; memiliki penjualan bersih tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00,(Lima Puluh Miliar Rupiah).

7. **Usaha Besar** adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih dan hasil penjualan lebih besar dari kekayaan usaha menengah.
8. **Ekonomi rakyat** adalah kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh kebanyakan rakyat Indonesia, yang umumnya terdiri dari : koperasi, pengusaha mikro, pengusaha kecil dan pengusaha menengah (Renstra Kementrian Koperasi dan UKM RI Tahun 2005 -2009).
9. **Ekonomi Kerakyatan** adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produkif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi (Renstra Kementrian Koperasi dan UKM RI Tahun 2005 -2009).
10. **Koperasi (UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian)** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendasar atas asas kekeluargaan.
11. **Perkoperasian** adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
12. **Gerakan Koperasi** adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
13. **Koperasi Primer** adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
14. **Koperasi Sekunder** adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

15. Definisi Industri Kecil :

Adalah Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta dan mempunyai penjualan per tahun Rp 1 milyar atau kurang.

16. Batasan Skala usaha (Berdasarkan BPS) yaitu :

Industri dan Dagang Mikro (ID- Mikro)	= 1 - 4 orang
Industri dan Dagang Kecil (ID- Kecil)	= 5 - 19 orang
Industri dan Dagang Menengah (ID-Menengah)	= 20 - 99 orang
Industri dan Dagang Besar (ID- Besar)	= 100 orang keatas

17. Agro Industri (FAO/Hicks 1996)

Adalah suatu Industri yang menggunakan bahan baku dari pertanian dengan jumlah minimal 200/o dari jumlah bahan baku yang digunakan.

18. Klaster Industri :

Adalah kerjasama partnership antara stakeholder yang ada yaitu industri inti (core industri), industri pendukung (supporting industry), industri terkait (related industry) dan lembaga-lembaga pendukung lainnya, sehingga akan meningkatkan daya saing serta menciptakan keunggulan komparatif menjadi kompetitif.

19. Sentra Industri :

- Pusat kegiatan industry kecil / menengah di kawasan / lokasi tertentu
- IKM menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis
- Memiliki prospek sebagai pusat pengembangan IKM yang berpotensi menjadi klaster

20. OVOP (One Village One Product) :

Adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di suatu wilayah untuk menghasilkan suatu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal

21. Komoditas Potensial

Adalah komoditas daerah yang memiliki potensi berkembang karena memiliki keunggulan komparatif (kecukupan sumberdaya: bahan baku lokal, ketrampilan SDM lokal, teknologi produksi lokal, sarana dan prasarana lokal)

22. Komoditas Andalan

Adalah komoditas yang dipandang dapat dipersaingkan dengan produk sejenis daerah lain karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi

23. Komoditas Unggulan

Adalah komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif karena telah memenangkan persaingan dengan produk sejenis daerah lain

24. Kriteria 4 Kelompok Komoditi :

- a) Penggerak Perekonomian Daerah (Industri yang memproduksi barang/jasa yang menggunakan bahan baku utamanya berbasis pada sumberdaya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerahnya sendiri)

Ciri / kriteria :

- Bahan baku mudah diperoleh / tersedia di daerah
- Teknologi sederhana
- Ketrampilan dasar bersifat turun menurun
- Padat karya / melibatkan tenaga kerja cukup banyak
- Peluang pasar cukup banyak (domestic dan atau ekspor)
- Ciri khas terkait karya seni budaya daerah
- Melibatkan masyarakat ekonomi lemah
- Secara ekonomis menguntungkan

- b) Supporting industri (industri yang membuat barang/jasa bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri tetapi dijual ke pasar bebas atau industri lain untuk mendukung produk akhirnya yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Ciri / Kriteria :

- Hasil industrinya dipasok ke pasar bebas ke industry lain
- Nilai tambah akan meningkat
- Padat karya / banyak menyerap tenaga kerja
- Bersifat substitusi impor
- Pada umumnya bersifat sub contracting

Cakupannya : komponen permesinan (permesinan sederhana, bengkel perkitan, reparasi/maintenance), komponen elektronika (alat komunikasi alat bangunan/rumah), komponen kendaraan bermotor (roda 4 dan 2, jasa reparasi, jasa rekondisi) dan komponen barang-barang karet dan plastik.

- c) Industri berorientasi ekspor (Industri yang memiliki daya saing yang cukup tinggi sehingga produknya mampu mengisi pasar internasional baik dilakukan sendiri maupun oleh pedagang/mediator)

Ciri / kriteria :

- Berbasis SDA daerah
- Padat karya / menyerap banyak tenaga kerja
- Memiliki daya saing cukup
- Peluang pasar luas (dalam dan luar negeri)

Cakupannya : kimia dan bahan bangunan (minyak atsiri, pengolahan kayu),kerajinan (perhiasan, bordir, keramik; kerajinan kayu, kerajinan logam, batik).

- d) Industri Inisitif baru (suatu usaha untuk mengembangkan industri baerbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge-base) yang menghasilkan nilai tambah tinggi)

Ciri / kriteria :

- Berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
- Menggunakan teknologi maju / tinggi
- Pada umumnya meruapakan cabang / jenis industry yang akan berkembang pesat di masa mendatang

Cakupannya : Industri yang menghasilkan produk/memberikan jasa layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

E. PENCAPAIAN KINERJA, ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas periode Rentra 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Berdasar SPM	Berdasar IKK	Berdasar lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Realisasi				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Peningkatan PDRB dari sektor industri (juta Rp)	-	-	1,751,000 s.d. 2,483,000	1,200,000 s.d. 1,300,000	1,300,000 s.d. 1,400,000	1,400,000 s.d. 1,500,000	1,500,000 s.d. 1,600,000	1,600,000 s.d. 1,751,000	1,387,000	1,469,759	1,627,225	1,737,000	1,824,892	106.69	104.98	108.48	108.56	104.22
2	Pengembangan jumlah perusahaan industri sedang dan kecil (unit)	-	-	40,078	39,402	39,535	39,679	39,812	40,078	39,546	39,582	39,789	40,099	40,519	100.37	100.12	100.28	100.72	101.10
3	Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan dan jasa (juta rupiah)	-	-	1,598,000 s.d. 2,411,000	1,200,000 s.d. 1,300,000	1,300,000 s.d. 1,400,000	1,400,000 s.d. 1,500,000	1,500,000 s.d. 1,600,000	1,600,000 s.d. 1,751,000	1,214,000	1,325,214	1,488,700	1,634,000	1,753,609	93.38	94.66	99.25	102.13	100.15
4	Peningkatan jumlah UKM (unit)	-	-	582,406	578,178	579,024	579,870	580,716	581,562	580,023	580,536	581,049	581,049	581,918	100.32	100.26	100.20	100.06	100.06
6	Peningkatan jumlah koperasi (unit)	-	-	575	525	535	545	555	565	490	507	509	513	518	93.33	94.77	93.39	92.43	91.68
7	Jumlah koperasi yang aktif (%)	-	70	-	70	70	70	70	70	88.37	87.97	88.02	67.25	67.89	126.24	125.67	125.74	96.07	96.99

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas periode Rentra 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3 (2010)	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Hasil retribusi daerah	2,812,004,000	2,738,700,000	2,738,700,000	3,000,000,000	3,850,000,000	2,683,419,675	2,761,254,675	2,721,667,775	3,326,493,485	4,118,650,340	0.95	1.01	0.99	1.11	1.07	3,027,880,800	3,122,297,190
Lain-lain PAD yang Sah		-	-			10,951,594	21,235,979	22,329,181	8,343,507	135,000							
Jumlah	2,812,004,000	2,738,700,000	2,738,700,000	3,000,000,000	3,850,000,000	2,694,371,269	2,782,490,654	2,743,996,956	3,334,836,992	4,118,785,340	0.96	1.02	1.00	1.11	1.07	3,027,880,800	3,134,896,242
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
Belanja pegawai	4,963,510,441	8,926,265,714	11,170,139,077	11,093,564,079	13,298,798,276	5,471,163,431	8,507,550,852	9,859,001,795	10,906,700,827	11,870,411,207	1.10	0.95	0.88	0.98	0.89	9,890,455,517	9,322,965,622
Belanja langsung																	
Belanja pegawai	2,138,395,000	1,266,880,000	577,747,170	648,789,500	517,812,500	1,550,695,500	1,148,359,000	534,017,500	567,092,000	436,364,000	0.73	0.91	0.92	0.87	0.84	1,029,924,834	847,305,600
Belanja barang dan jasa	2,979,989,850	3,367,106,500	1,703,837,830	3,132,310,500	5,302,133,637	2,626,700,318	2,992,511,273	1,634,513,145	2,867,947,080	4,833,971,456	0.88	0.89	0.96	0.92	0.91	3,297,075,663	2,991,128,654
Belanja modal	687,621,650	1,052,260,600	800,995,000	260,900,000	2,544,500,000	621,253,690	1,024,990,050	797,696,000	251,993,150	1,885,142,500	0.90	0.97	1.00	0.97	0.74	1,069,255,450	916,215,078
Jumlah	10,769,516,941	14,612,512,814	14,252,719,077	15,135,564,079	21,663,244,413	10,269,812,939	13,673,411,175	12,825,228,440	14,593,733,057	19,025,889,163	0.95	0.94	0.90	0.96	0.88	15,286,711,465	14,077,614,955

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. KONDISI UMUM DAERAH

1. Kondisi Wilayah

Kabupaten Banyumas merupakan pusat pengembangan kawasan di dalam kerangka pembangunan nasional dengan pusat pengembangan di kota Purwokerto dan wilayah pelayanannya meliputi beberapa daerah seperti Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Cilacap. Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah, Kota Purwokerto ditetapkan sebagai kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Hal ini bertitik tolak dari fungsi Kota Purwokerto pada khususnya dan Kabupaten Banyumas pada umumnya sebagai daerah yang mempunyai peranan penting di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah. Selain itu keberadaan fasilitas pendidikan yang berskala nasional seperti perguruan tinggi negeri Universitas Jenderal Sudirman, kawasan wisata Baturaden dan saat ini sedang dikembangkan kawasan Kebun Raya di kaki Gunung Slamet menjadikan Kota Purwokerto semakin penting peranannya.

Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Banyumas merupakan kawasan budidaya pertanian dengan tingkat kesuburan yang cukup baik. Namun demikian dari pemanfaatan tanah yang ada masih belum maksimal penggunaannya terhadap kegiatan produktif. Guna menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan pangan nasional, maka Kabupaten Banyumas dijadikan salah satu daerah produksi pangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 21 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, Perda tersebut diperkuat dengan adanya kesepakatan antara Bupati/Walikota se Jateng untuk mempertahankan lahan sawah yang produktif dari alih fungsi lahan

Berkaitan dengan hal tersebut, sektor pertanian sebagai basis perekonomian rakyat yang menghidupi sebagian besar penduduk Kabupaten Banyumas perlu didorong oleh pembangunan industri yang menyediakan input produksi dan mengolah hasil-hasil pertanian (agro industri). Aktivitas perdagangan antar daerah di Kabupaten banyumas yang meliputi perdagangan barang-barang produksi antara lain produksi hasil pertanian, hasil industri dan hasil penggalian dan aktivitas hotel dan losmen serta restoran dan rumah makan masih mempunyai peluang untuk ditingkatkan. Hal ini ditunjang dengan dimilikinya pusat perdagangan yang terletak di Kota Purwokerto, Ajibarang dan Wangon yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Banyumas.

2. Kondisi Perekonomian Daerah

Seperti telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, bahwa wujud perekonomian yang dibangun adalah terciptanya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang lebih baik dan lebih merata melalui upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai dengan lebih memperdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi regional dengan mengembangkan sistim ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Upaya tersebut berbasis pada sumberdaya lokal (alam dan sumberdaya manusia) yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi suatu daerah. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta ikut serta dalam menggerakkan roda perekonomian. Masuknya investasi ke suatu daerah tergantung pada daya tarik terhadap investasi dan iklim investasi yang kondusif.

Potensi investasi sektor industri yang dimiliki Banyumas antara lain industri minyak atsiri, gula kelapa, bioetanol, industri susu, tahu, mebel kayu dan lain-lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Data Perkembangan Komoditas Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2013

NO	KOMODITAS	PRODUKSI			UNIT USAHA		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	GULA KELAPA	59.360,35 ton / th	63.102,35 ton / th	72.109,19 ton / th	30.456	31.182	31.416
2	MINYAK ATSIRI						
	- Minyak Nilam	52.125 kg / th	52.125 kg / th	54.192 kg / th	25	25	26
	- Minyak Cengkeh	218.200 kg / th	218.850 kg / th	219.916 kg / th	19	20	23
	- Fraksinasi Nilam	1.300 kg / th	1.500 kg / th	2.100 kg / th	2	2	2
	- Fraksinasi Cengkeh	750.000 kg / th	1.380.000 kg / th	2.190.000 kg / th	4	5	5
3	TEPUNG TAPIOKA	17.474,8 ton / th	17.496 ton / th	21.377 ton / th	103	110	119
4	GETUK GORENG	3.000 ton / th	3.055 ton / th	4.242 ton / th	58	69	73
5	TAHU	11.304 ton / th	11.304 ton / th	13.701 ton / th	821	821	854
6	SUSU	875 ton / th	1.855 ton / th	3.850 ton / th	1	1	3
7	MEBEL KAYU	67.200 set / th	67.301 set / th	74.403 set / th	1.416	1.426	1.486
8	BIO ETANOL	3.760kg / hr	3.760kg / hr	3.760 kg / hr	381	381	312
9	NATURAL EXTRACK (kopi, coklat, kencur)	50.000 kg / th	70.000 kg / th	100.000 kg / th	1	1	1

Sektor perdagangan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PDRB Kabupaten Banyumas. Dari sektor Perdagangan, komoditi ekspor dari Kabupaten Banyumas yaitu Kayu olahan dan Minyak Atsiri.

Data Komoditi Ekspor Kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2013

No	Komoditi	2011		2012		2013 (S/D OKTOBER)	
		Volume	Volume	Volume	Nilai (US.\$)	Volume	Nilai (US.\$)
1.	Kayu Olahan (PT. ARUMBAI)	1.968,39 m3	1.374.284,61	1.495,619 m3	998.318	935,169 m3	537.567,65
2.	Minyak Atsiri ■ PT. INDESSO ■ PT. TAKASAGO	871.970 kg	14.103.852	918.460 kg	18.352.290	753.700 kg	14.987.960

Sub sektor perdagangan terdiri dari perusahaan dagang besar, menengah dan kecil. Pada tahun 2013 Perusahaan dagang kecil merupakan perusahaan dengan jumlah paling banyak yaitu lebih dari 80 % dari total perusahaan dagang yang ada. Namun pemerintah perlu melakukan upaya-upaya agar perusahaan dagang kecil dapat bertahan dan menopang perekonomian rakyat.

Jumlah penerbitan Ijin Perusahaan Dagang Menurut Golongan Usaha Di Kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2013

No	Golongan Usaha	2011	2012	2013(s/d Oktober)
1	Perusahaan Dagang Besar	74	7	6
2	Perusahaan Dagang Menengah	162	106	68
3	Perusahaan Dagang Kecil	672	522	356

Sedangkan jumlah penerbitan ijin perusahaan menurut badan hukum perusahaan di Kabupaten Banyumas dari tahun 2011 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Jumlah penerbitan Ijin Perusahaan Menurut Golongan Usaha
dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan di Kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2013

No	Bentuk Badan Hukum	2011	2012	2013 (s/d Oktober)
1	Perseroan terbatas	52	74	155
2	Koperasi	10	2	14
3	CV	174	219	503
4	Firma (Fa)	0	0	14
5	Perusahaan Perseorangan (PO)	214	120	407
6	Bentuk Usaha Lainnya	1	0	0

Untuk meningkatkan pemasaran produk-produk UMKM khususnya di Kabupaten Banyumas agar dapat berkompetisi di pasar global terutama untuk mengantisipasi ACFTA, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas mengikutsertakan UMKM untuk mengikuti pameran produk IKM dan promosi produk IKM melalui website.

Pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas, merupakan sumber retribusi yang cukup potensial, hal ini bisa terlihat dengan perkembangan target pendapatan yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dengan kenaikan target yang harus dicapai, maka tugas pengelolaan pendapatan pasar menjadi semakin berat. Dengan demikian maka perlu setiap pasar untuk menghitung berapa potensi retribusi di tiap-tiap pasar, karena dengan diketahuinya potensi pasar akan memudahkan seberapa jauh penarikan retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien.

Sebagai gambaran dari 25 pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, pada tahun 2012 diperoleh pendapatan retribusi sebesar Rp. 4.118.650.340,- melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 3.850.000.000,- . atau sebesar 106,98 %. Sedangkan tahun 2013 perolehan PAD dari retribusi pasar sebesar Rp. 3.691.461.785,- s/d bulan November dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 4.050.000.000,- .

Koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) merupakan salah satu sektor pendukung keberhasilan dalam bidang perekonomian. Hal ini dapat dibuktikan dari ketahanan dan keberadaan koperasi dan usaha kecil menengah pada saat terjadinya krisis ekonomi global yang lalu. Pada saat itu, banyak usaha skala besar mengalami stagnasi ataupun kebangkrutan, namun sektor UKM terbukti tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Koperasi dan UKM mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan Koperasi dan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Kabupaten Banyumas paling tidak dapat dilihat dari : 1). Kedudukannya sebagai pemain penting dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor 2). Penyedia lapangan kerja 3). Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat 4). Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi pada masa mendatang.

Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan UMKM seharusnya diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumber daya lokal.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UKM adalah rendahnya kualitas lembaga dan usaha, struktur permodalan, daya inovasi, etos kerja, akses teknologi informasi, peluang pasar, lemahnya jaringan usaha yang pada akhirnya mengurangi daya saing baik di pasar lokal maupun internasional.

Pelatihan manajemen usaha kecil dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melalui Bidang UKM dan Koperasi untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi usaha kecil dan meningkatkan pengetahuan tentang manajemen usaha, perkoperasian dan kemampuan pengelolaan modal usaha kecil.

Dengan adanya pelatihan manajemen usaha kecil maka para pelaku usaha yang sebagian besar adalah usaha mikro akan bertambah pengetahuan dan wawasan dalam mengelola suatu usaha sehingga bisa berkembang dan mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Pelaku usaha nantinya diharapkan akan meningkat jiwa kewirausahaannya antara lain percaya diri, kerja keras dan semangat tinggi yang semuanya bermanfaat bagi kelanjutan perkembangan usahanya.

Untuk memenuhi permodalan yang dibutuhkan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2013 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi memberikan dana pinjaman bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif dan UMKM sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 kepada 55 kelompok (1.137 orang) di Kabupaten Banyumas.

Data Dana Pinjaman Bergulir Tahun 2011 s/d 2013

No.	Sumber Dana	Jumlah Anggaran Bagi KM2P	Angsuran yang digulirkan kembali	Penerima Manfaat
1.	APBD TA 2011 (Tahap I)	1.000.000.000,-	-	45 Klpk (896 orang)
2.	APBD TA 2011 (Tahap II)	-	500.000.000,-	23 Klpk (495 orang)
3.	APBD TA 2012 (Tahap I)	1.000.000.000,-	-	34 Klpk (810 orang)
4.	APBD TA 2012 (Tahap II)	-	500.000.000,-	17 Klpk (390 orang)
5.	APBD TA 2013 (Tahap I)	1.000.000.000,-	-	37 Klpk (782 orang)
6.	APBD TA 2013 (Tahap II)	-	500.000.000,-	18 Klpk (355 orang)
	JUMLAH	3.000.000.000,-	1.500.000.000,-	174 Klpk (3.728 orang)

Pembangunan Koperasi di Kabupaten Banyumas mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2013 jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Banyumas sebanyak 391 unit. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada tahun 2012 dimana koperasi yang aktif sebanyak 381 unit. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2013 sebanyak 92.156 orang, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.722 orang.

Permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri yang berasal dari simpanan anggota dan modal luar (Pinjaman). Modal sendiri meningkat dari Rp. 136.688 juta di tahun 2012 menjadi Rp. 169.394 juta di tahun 2013. Sedangkan modal luar juga meningkat dari Rp. 239.216 juta di tahun 2012 menjadi Rp. 275.480 juta di tahun 2013. Volume usaha koperasi pada tahun 2013 sebesar Rp. 390.658 juta lebih besar dari tahun 2012 sebesar Rp 344.983 juta.

Perkembangan data Koperasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2011 s/d 2013

Variabel	2011	2012	2013
Jumlah Koperasi (Unit)	518	518	519
Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	349	381	391
Jml Anggota Koperasi (org)	100.570	93.842	92.156
Jumlah Karyawan (orang)	1.597	2.579	2.722
Modal Sendiri (Rp juta)	131.415	136.688	169.394
Modal Luar (Rp juta)	235.504	239.216	275.480
Volume Usaha (Rp juta)	325.897	344.983	390.658
Sisa Hasil Usaha (Rp juta)	8.702	9.574	10.511

B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

Dalam rangka untuk melihat kondisi yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas perlu adanya analisis lingkungan semua aspek kehidupan masyarakat khususnya yang menyangkut tugas pembangunan dan pelayanan yang diberikan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Hal ini dimaksudkan agar terdapat gambaran yang utuh atas aspek-aspek yang ada tentang kondisi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.

Pembahasan atas aspek lingkungan dalam hal ini meliputi faktor kekuatan dan kelemahan. Yang dimaksud faktor kekuatan adalah suatu potensi yang mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan kelemahan adalah segala sesuatu yang dipandang menghambat pelaksanaan pembangunan.

Faktor Kekuatan

- Kondisi keamanan daerah yang sangat kondusif untuk pelaksanaan pembangunan
- Tingkat partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan yang semakin tinggi
- Terciptanya iklim kondusif baik dari sisi keamanan, sosial dan politik, tenaga kerja, penerapan pelayanan satu pintu (one stop service) dalam perijinan investasi serta kebijakan peraturan daerah yang pro investasi
- Posisi geografis yang terletak dipersimpangan wilayah regional di Jawa Tengah bagian barat selatan

- Tersedianya lembaga keuangan perbankan yang melayani dan mendukung kegiatan usaha
- Melimpahnya tenaga kerja
- Memiliki pusat-pusat pelayanan perekonomian yang berskala regional
- Masyarakat Banyumas sebagai pasar potensial
- Keleluasaan masyarakat dalam memilih produk yang disukai
- Dedikasi pegawai yang tinggi
- Jumlah dan kemampuan pegawai yang memadai
- Lahan yang luas
- Sumberdaya alam yang melimpah
- Letak geografis yang strategis
- Jumlah penduduk yang tinggi

Faktor Kelemahan

- Angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi
- Adanya kecenderungan bagi masyarakat menengah keatas yang kurang cinta terhadap produk dalam negeri
- Pengetahuan konsumen akan produk barang yang masih rendah
- Banyaknya produk yang beredar tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan
- Belum berkembangnya produk-produk yang berkualitas baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri/ekspor
- Belum tersedianya akses pasar di bidang informasi/database
- Belum optimalnya perlindungan konsumen
- Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung
- Potensi sumberdaya alam yang belum tergarap secara maksimal
- Lingkungan usaha yang tidak kondusif
- Perilaku birokrasi yang kurang aspiratif.

Untuk keperluan analisis lingkungan luar, perspektif yang dipakai adalah kondisi di luar organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas yang merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan. Juga peluang untuk mengembangkan diri keluar Kabupaten Banyumas. Lingkungan luar ini dapat berupa kondisi politik, kebijakan pemerintah yang lebih atas, potensi dasar, para stakehotders, para pengguna jasa layanan, kecenderungan global dan lain-lain yang berada diluar komponen Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas. pemaparan untuk kondisi lingkungan luar ini juga disesuaikan dengan analisis kondisi lingkungan dalam yaitu mengacu pada bidang-bidang

pembangunan. Agar mudah ada pandangan yang menyeluruh terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi keberlangsungan program pembangunan pada tiap bidang di Kabupaten Banyumas.

Peluang

- Berkembangnya kerjasama antar daerah seperti Barlingmascakeb dan kerjasama dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya kerjasama antar daerah
- Masih terbukanya pasar bagi produk potensial Banyumas
- Adanya kebijakan pemerintah dalam standar pelayanan Minimal
- Masih terbukanya perdagangan retail di Purwokerto dan sekitarnya.
- Masih sangat terbuka untuk mengembangkan produk-produk barang kerajinan untuk ekspor.
- Terbukanya jaringan kerjasama antar daerah, nasional, internasional bagi pemasaran barang
- Pemerintahan yang kondusif.

Ancaman

- Banyak produk yang sejenis/sama dengan kabupaten lain
- Arus globalisasi/persaingan pasar bebas dimasa datang sehingga persaingan pasar dengan barang-barang impor
- Masuknya pemodal besar dari luar Banyumas yang mendirikan minimarket
- Penawaran kemudahan dari daerah lain dalam hal menarik investor
- Masuknya produk luar negeri ke Banyumas.

Sehubungan dengan kondisi tersebut yang tertuang dalam analisa SWOT maka kondisi yang diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Banyumas dijabarkan sebagai berikut :

1. Memperkuatnya kelembagaan ekonomi rakyat
2. Meningkatkan jaringan kerjasama antara PKMK dengan pengusaha besar
3. Terbentuknya jaringan pemasaran barang/jasa
4. Meningkatkan jumlah wirausaha baru
5. Berkembangnya produk-produk bernilai tambah tinggi dan berorientasi dalam negeri serta ekspor
6. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi dan distribusi
7. Terbentuknya jaringan perindustrian dan perdagangan yang terjamin kesinambungannya.

8. Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan perdagangan barang dan jasa
9. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha secara memadai.
10. Terbentuk dan tersedianya jaminan perlindungan konsumen
11. Tersedianya akses pasar dibidang informasi tentang usaha industri dan perdagangan.
12. Meningkatnya peran swasta dalam pengembangan ekspor barang dan jasa
13. Terbentuknya kelembagaan usaha daerah yang mencerminkan prinsip keadilan antara pengusaha kecil, menengah dan besar.
14. Semakin kuatnya institusi pendukung pasar dan jaringan informasi/database pengusaha industri.
15. Meningkatnya minat investasi daerah
16. Teridentifikasinya produk-produk unggulan daerah
17. Meningkatnya kandungan lokal daerah dalam kegiatan industri dan perdagangan.
18. Meningkatnya kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku industri
19. Meningkatnya kegiatan ekspor hasil industri.
20. Terbentuknya jaringan pemasaran usaha daerah yang terjamin kesinambungannya.

Dalam mencapai keberhasilan organisasi, faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan tersedianya tenaga spesialis akan meningkatkan pelayanan usaha industri dan perdagangan dalam mengatasi masalah-masalah manajerial dan masalah teknis lainnya.
2. Penempatan personil yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan meningkatkan efektifitas koordinasi dengan instansi terkait dan pelayanan kepada usaha industri dan perdagangan.
3. Tersedianya data dan informasi yang akurat di tingkat organisasi dapat memperkuat dukungan usaha industri dan perdagangan dan meningkatkan peluang investasi daerah.
4. Tersedianya dana, sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada usaha industri dan perdagangan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUMAS

1. Visi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tidak tertinggal jauh ke belakang dari daerah lainnya.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Sejalan dengan tujuan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengantisipasi tantangan di masa depan, Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas mempunyai visi :

" TERWUJUDNYA INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM YANG MAJU DAN BERDAYA SAING ".

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengenal Dinas perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dan ikut berperan dalam program-programnya agar diperoleh hasil sesuai dengan misi yang akan dicapai.

Proses perumusan misi yang dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan .

Untuk mencapai visi tersebut diatas maka Misi Dinas perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas adalah :

" MEMBERDAYAKAN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM MELALUI PENINGKATAN KELEMBAGAAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, FASILITASI PEMBIAYAAN DAN KEMITRAAN "

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Adapun tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas secara umum adalah menjadikan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional yang maju dan berdaya saing. Tujuan pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Membangun sektor industri kecil menengah yang berdaya saing;
- 2) Memperluas pangsa pasar produk domestik dan perlindungan konsumen;
- 3) Pengelolaan pasar dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang baik;
- 4) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UKM.

2. Sasaran

Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dalam pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi kantor dan kinerja aparat pemerintah
- 2) Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif untuk pengembangan dan perluasan industri
- 3) Semakin kuatnya daya saing produk industri kecil dan menengah
- 4) Meningkatnya pelayanan informasi perindustrian perdagangan dan koperasi
- 5) Meningkatnya keterampilan, keahlian, kompetensi tenaga kerja industri sehingga mampu meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar global
- 6) Peningkatan kesadaran pelaku dunia usaha terhadap upaya perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas dan standarisasi barang dan jasa
- 7) Penguatan institusi pendukung pasar dan pengembangan usaha
- 8) Meningkatnya pelayanan kepada dunia usaha untuk memasuki sistem ekonomi global
- 9) Pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima yang baik
- 10) Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
- 11) Meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM
- 12) Terciptanya pola kemitraan yang saling menguntungkan antara IKM dengan industri besar.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Membangun sektor industri yang berdaya saing	Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif untuk pengembangan dan perluasan industri	Terfasilitasinya penyaluran pinjaman bergulir untuk UMK dan termonitornya perkembangan UMKM di Kabupaten Banyumas	300 UMKM	300 UMKM	300 UMKM	300 UMKM	300 UMKM
		Semakin kuatnya daya saing produk industri kecil dan menengah	Terlaksananya penyediaan saran dan prasarana kluster industri	2 klaster	2 klaster	2 klaster	2 klaster	2 klaster
		Meningkatnya pelayanan informasi perindustrian perdagangan dan koperasi	Tersedianya sarana informasi bagi masyarakat mengenai perindustrian, perdagangan dan KUMKM di Kabupaten Banyumas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Meningkatnya keterampilan, keahlian, kompetensi tenaga kerja industri sehingga mampu meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar global	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang
2	Memperluas pangsa pasar produk domestik dan perlindungan konsumen	Terciptanya pola kemitraan yang saling menguntungkan antara IKM dengan industri besar	Terselenggaranya pertemuan kerjasama kemitraan antara pengusaha industri kecil dengan pengusaha besar	30 IKM	30 IKM	30 IKM	30 IKM	30 IKM
		Peningkatan kesadaran pelaku dunia usaha terhadap upaya perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas dan standarisasi barang dan jasa	Meningkatnya tertib hukum para pengusaha dalam menjalankan usahanya	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang
		Meningkatnya pelayanan kepada dunia usaha untuk memasuki sistem ekonomi global	Terfasilitasinya IKM dan UMKM untuk mengikuti pameran produk	6 paket	7 paket	8 paket	8 paket	8 paket

3	Pengelolaan pasar dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang baik	Penguatan institusi pendukung pasar dan pengembangan usaha	Tersedianya dan terpeliharanya los dan banguna pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah serta sarana pendukungnya	27 pasar	27 pasar	27 pasar	27 pasar	27 pasar
		Pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima yang baik	Tertatanya PKL dan pedagang asongan sesuai tempat usaha yang telah diijinkan	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang
4	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM	Terlaksananya pembinaan kelembagaan koperasi	270 koperasi	270 koperasi	270 koperasi	270 koperasi	270 koperasi
		Meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang

C. STRATEGI

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif sesuai dengan visi dan misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.

Untuk menjembatani sasaran pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, visi dan misi Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, maka perlu dijabarkan dalam bentuk strategi sebagai berikut :

1. Strategi Pengembangan Industri yang Berdaya Saing

Pengembangan industri diharapkan akan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja pada masa mendatang.

2. Strategi Pengembangan Usaha perdagangan

Pengembangan usaha perdagangan merupakan suatu upaya untuk mengatasi keterbatasan pelaku usaha dalam mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis.

3. Strategi Pengembangan pasar dan pengendalian pedagang Kaki Lima

Pengembangan Pasar dan Pengendalian PKL merupakan suatu cara mengembangkan kelompok pelaku usaha dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor formal dan informal terutama disektor perdagangan di pasar dan pedagang kaki lima.

4. Strategi Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM merupakan salah satu wahana untuk mewujudkan adanya demokrasi ekonomi. Strategi ini bertujuan mewujudkan koperasi dan manajemen UKM yang berkualitas.

5. Strategi Pengembangan Dukungan terhadap Investor

Pengembangan Sistem Pendukung terhadap kemudahan investasi merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian pembangunan daerah.

D. KEBIJAKAN

Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai meliputi :

1. Urusan Perindustrian

- a) Mengembangkan peran IKM agar setara dengan industri besar, sehingga menjadi pondasi perekonomian yang kokoh.

Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan seperti perlindungan, pendidikan dan pelatihan dan informasi bisnis dan teknologi, permodalan serta lokasi berusaha adalah suatu strategi menuju dalam rangka memberdayakan IKM.

- b) Mewujudkan IKM yang mandiri serta mendukung industri besar dalam suatu kerangka kerja sama yang saling menguntungkan.

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Disamping itu upaya pengembangan UKM dengan mensinergikannya dengan industri besar melalui pola kemitraan, juga akan memperkuat struktur ekonomi baik nasional maupun daerah. Partisipasi pihak terkait atau stakeholders perlu terus ditumbuhkembangkan lainnya agar UKM betul-betul mampu berkiprah lebih besar lagi dalam perekonomian nasional.

- c) Meningkatkan kemampuan teknologi industri melalui layanan teknologi industri dan pengembangan teknologi baru.

Kebijakan ini dalam rangka meningkatkan penguasaan teknologi baru, penerapan teknologi tepat guna, pengembangan inovasi teknologi dan desain, dan meningkatkan kemitraan dengan institusi penelitian untuk penerapan teknologi secara optimal,

- d) Mengembangkan kawasan industri dan penyediaan sarana prasarana penunjang industri.

2. Urusan Perdagangan

- a) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap peningkatan kualitas dan standarisasi barang dan jasa.
- b) Pemberdayaan institusi pendukung mekanisme distribusi barang dan jasa.
- c) Meningkatkan penyebaran informasi kerjasama perdagangan, serta penataan kelembagaan dan sistem fasilitas perdagangan baik di tingkat regional, nasional dan internasional.
- d) Mengembangkan pemberdayaan pedagang kaki lima.

3. Urusan Koperasi dan UKM

- a) Mengembangkan UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan daya saing. Usaha Kecil dan Menengah (uKM) mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Pengembangan UKM kedepan, perlu menggabungkan keunggulan lokal (lingkungan internal) dan peluang pasar global, yang disinergikan dengan era otonomi daerah dan pasar bebas. perlu berpikir dalam skala global dan bertindak lokal (think globally and act locally) dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan UKM.
- b) Mengembangkan jiwa kewirausahaan, pengetahuan dan keterampilan pengusaha kecil dan menengah
- c) Meningkatkan kualitas SDM Koperasi
- d) Memperkuat kelembagaan koperasi dan UKM

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas yang telah diuraikan pada bab terdahulu, rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dirumuskan sebagai berikut :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
						1		2		3		4		5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor dan kinerja aparata pemerintah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor dan terselenggaranya operasional UPT Pasar	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor dan kinerja aparat pemerintah											
			Ketatausahaan	Terpenuhinya kebutuhan ketatausahaan dinas selama 5 tahun	1 tahun	1 tahun	2,547,260,000	1 tahun	2,600,000,000	1 tahun	2,700,000,000	1 tahun	2,800,000,000	1 tahun	2,900,000,000
			UPT Pasar Wage	Terselenggaranya operasional Pasar Wage selama 5 tahun	1 tahun	1 tahun	400,000,000	1 tahun	400,000,000	1 tahun	400,000,000	1 tahun	400,000,000	1 tahun	400,000,000
			UPT Pasar Wangon	Terselenggaranya operasional Pasir Wangon selama 5 tahun	1 tahun	1 tahun	150,000,000	1 tahun	150,000,000	1 tahun	150,000,000	1 tahun	150,000,000	1 tahun	150,000,000
			UPT Pasar Ajibarang	Terselenggaranya operasional Pasar Ajibarang selama 5 tahun	1 tahun	1 tahun	300,000,000	1 tahun	300,000,000	1 tahun	300,000,000	1 tahun	300,000,000	1 tahun	300,000,000

			UPT Pasar Sokaraja	Terselenggaranya operasional Pasar Sokaraja selama 5 tahun	1 tahun	1 tahun	200,000,000	1 tahun	200,000,000	1 tahun	200,000,000	1 tahun	200,000,000	1 tahun	200,000,000
Membanung sektor industri yang berdaya saing	Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif untuk pengembangan dan perluasan industri	Terfasilitasinya penyaluran pinjaman bergulir untuk UMKM dan termonitornya perkembangannya UMKM di Kabupaten Banyumas	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)											
			Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	teridentifikasi perkembangan UMKM di Kabupaten Banyumas	300.000 UMKM	300.000 UMKM	150,000,000	300.000 UMKM	150,000,000	300.000 UMKM	150,000,000	300.000 UMKM	150,000,000	300.000 UMKM	150,000,000
			Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terfasilitasinya pengembangan UMKM sebanyak 1500 UMKM	300 UMKM	300 UMKM	150,000,000	300 UMKM	150,000,000	300 UMKM	150,000,000	300 UMKM	150,000,000	300 UMKM	150,000,000
			Pelatihan Manajemen Usaha Kecil	Jumlah SDM pada sentra / kelompok usaha yang terlatih dalam bidang manajemen usaha kecil sebanyak 750 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	60,000,000	150 UMKM	60,000,000	150 UMKM	70,000,000	150 UMKM	70,000,000	150 UMKM	70,000,000

			Fasilitasi Pendampingan Pinjaman Dana Bergulir	Teridentifikasi masyarakat miskin produktif dan UKM calon penerima bantuan dana bergulir sebanyak 300 kelompok	60 kelompok	60 kelompok	150,000,000	60 kelompok	150,000,000	60 kelompok	150,000,000	60 kelompok	150,000,000	60 kelompok	150,000,000
			Dana Pinjaman Bergulir (Dana di DPPKAD)	Terselurnya bantuan dana bergulir kepada masyarakat miskin produktif dan UKM calon penerima bantuan dana bergulir sebanyak 300 kelompok	51 kelompok	60 kelompok	2,000,000,000	60 kelompok	2,000,000,000	60 kelompok	2,500,000,000	60 kelompok	2,500,000,000	60 kelompok	3,000,000,000
			Monitoring dan Evaluasi UMKM Penerima Dana Bergulir dari APBD Kabupaten Banyumas	Termonitornya UMKM penerima dana pinjaman bergulir sebanyak 1500 UMKM	263 UMKM	300 UMKM	60,000,000	300 UMKM	60,000,000	300 UMKM	70,000,000	300 UMKM	70,000,000	300 UMKM	80,000,000
	Semakin kuatnya daya saing produk industri kecil dan menengah	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana klaster industri	Pengembangan Penataan Struktur Industri	Meningkatnya sarana dan prasarana klaster industri											

			Penyediaan sarana maupun prasarana Klaster Industri	Tersedianya sarana dan prasarana kelompok industri kecil sebanyak 10klaster	1 klaster	2 klaster	200,000,000	2 klaster	200,000,000	2 klaster	200,000,000	2 klaster	200,000,000	2 klaster	200,000,000
	Meningkatnya pelayanan informasi perindustrian perdagangan dan koperasi	Tersedianya sarana informasi bagi masyarakat mengenai perindustrian, perdagangan dan KUMKM di Kabupaten Banyumas	Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Meningkatnya pelayanan informasi perindustrian perdagangan dan koperasi											
			Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat (Pembuatan Tabloid Dinperindagkop)	Tersedianya sarana informasi bagi masyarakat mengenai perindustrian ,perdagangan dan KUMKM di Kabupaten Banyumas selama 5 tahun	1 tahun	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	50,000,000
	Meningkatnya keterampilan , keahlian, kompetensi tenaga kerja industri sehingga mampu meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar global	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya keterampilan, keahlian, kompetensi tenaga kerja industri sehingga mampu meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar global											

			Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terselenggaranya pelatihan penguasaan Teknologi Industri Agro dan Non Agro untuk 500 orang	40 orang	100 orang	150,000,000	100 orang	150,000,000	100 orang	200,000,000	100 orang	200,000,000	100 orang	250,000,000
			Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya kemampuan usaha dan kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah											
			Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi perajin yang baru tumbuh sejumlah 600 orang	60 orang	120 orang	100,000,000	120 orang	100,000,000	120 orang	100,000,000	120 orang	100,000,000	120 orang	100,000,000
			Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Terselenggaranya sosialisasi HAKI bagi usaha mikro kecil menengah bagi 400 UMKM	45 UMKM	80 UMKM	50,000,000	80 UMKM	50,000,000	80 UMKM	50,000,000	80 UMKM	50,000,000	80 UMKM	50,000,000
			Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	Terbentuknya Tenant		20 tenant	150,000,000	20 tenant	150,000,000	20 tenant	150,000,000	20 tenant	150,000,000	20 tenant	150,000,000

			Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya daya saing produk industri kecil dan menengah Kab BMS											
			Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Terlaksananya pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri bagi 750 IKM	50 IKM	150 IKM	200,000,000	150 IKM	200,000,000	150 IKM	200,000,000	150 IKM	200,000,000	150 IKM	200,000,000
			Pembinaan Lingkungan Sosial	Terlaksananya pelatihan dan bantuan peralatan produksi industri kecil di sekitar Industri Hasil Tembakau dan Cengkeh sebanyak 5 paket	5 paket	5 paket	350,000,000	5 paket	350,000,000	5 paket	400,000,000	5 paket	400,000,000	5 paket	450,000,000
Memperluas pangsa pasar produk domestik dan perlindungan konsumen	Terciptanya pola kemitraan yang saling menguntungkan antara IKM dengan industri besar	Terselenggaranya pertemuan kerjasama kemitraan antara pengusaha industri kecil dengan pengusaha besar	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terselenggaranya pertemuan kerjasama kemitraan antara pengusaha industri kecil dengan pengusaha besar bagi 150 IKM	25 IKM	30 IKM	40,000,000	30 IKM	40,000,000	30 IKM	40,000,000	30 IKM	40,000,000	30 IKM	40,000,000

	Peningkatan kesadaran pelaku dunia usaha terhadap upaya perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas dan standarisasi barang dan jasa	Meningkatnya tertib hukum para pengusaha dalam menjalankan usahanya	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya tertib hukum para pengusaha dalam menjalankan usahanya											
			Monitoring Harga	Tersedianya data harga barang kebutuhan rumah tangga, barang umum dan barang penting lainnya sebanyak 625 kali	77 kali	125 kali	100,000,000	125 kali	105,000,000	125 kali	110,000,000	125 kali	115,000,000	125 kali	120,000,000
			Pengawasan dan Pengendalian Pendaftaran Perijinan dibidang usaha dagang	Terlaksananya pengawasan perijinan dan pendaftaran di bidang usaha dagang sebanyak 250 kali	50 kali	50 kali	50,000,000	50 kali	55,000,000	50 kali	60,000,000	50 kali	65,000,000	50 kali	70,000,000
			Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Terkendalnya peredaran minuman beralkohol di pasaran di 25 kecamatan	5 kecamatan	5 Kecamatan	60,000,000	5 Kecamatan	60,000,000	5 Kecamatan	70,000,000	5 Kecamatan	70,000,000	5 Kecamatan	70,000,000

			Pengawasan dan Pengendalian Toko Modern	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian toko modern di wilayah Kabupaten Banyumas		27 Kecamatan	50,000,000	27 Kecamatan	50,000,000	27 Kecamatan	50,000,000	27 Kecamatan	50,000,000	27 Kecamatan	50,000,000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen bagi 400 orang	40 orang	80 orang	60,000,000	80 orang	70,000,000	80 orang	70,000,000	80 orang	80,000,000	80 orang	80,000,000
	Meningkatnya pelayanan kepada dunia usaha untuk memasuki sistem ekonomi global	Terfasilitasi ya UMKM / IKM untuk mengikuti pameran produk	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Penguatan institusi pendukung pasar dan pengembangan usaha											
			Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Terlaksananya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri sebanyak 5 kali	1 kali	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	60,000,000	1 kali	60,000,000	1 kali	60,000,000
			Promosi dagang dan industri	Terfasilitasi nya IKM untuk mengikuti pameran produk 25 paket	5 paket	6 paket	500,000,000	7 paket	550,000,000	8 paket	600,000,000	8 paket	650,000,000	8 paket	700,000,000

Pengelolaan pasar dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang baik	Penguatan institusi pendukung pasar dan pengembangan usaha	Tersedianya dan terpeliharanya los dan bangunan pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah serta sarana pendukungnya	Revitalisasi pasar tradisional	Tersedianya bangunan pasar yang memadai sebanyak 15 pasar	2 pasar	3 pasar	15 Milyar	3 pasar	15 Milyar	3 pasar	15 Milyar	3 pasar	15 Milyar	3 pasar	15 Milyar
			Pengelolaan dan pemeliharaan pasar tradisional yang dikelola pemerintah daerah	Terpeliharanya pasar tradisional yang dikelola pemerintah dan meningkatnya SDM pengelola pasar tradisional sebanyak 23 pasar	23 pasar	23 pasar	2,000,000,000	23 pasar	2,500,000,000	23 pasar	3,000,000,000	23 pasar	3,500,000,000	23 pasar	4,000,000,000
			Intensifikasi pemungutan PAD	Terpenuhinya target PAD yang dikelola Dinperindagk op selama 5 tahun	1 tahun	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000
			DAK Perdagangan	Tersedianya los dan kios pasar yang memadai sebanyak 5 pasar	1 pasar	1 pasar	2,500,000,000	1 pasar	2,500,000,000	1 pasar	2,500,000,000	1 pasar	2,500,000,000	1 pasar	2,500,000,000

	Pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima yang baik	Tertatanya PKL dan Pedagang asongan sesuai tempat usaha yang telah diijinkan	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima yang baik											
			Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Tertatanya PKL dan Pedagang Asongan sesuai tempat usaha yang telah diijinkan sejumlah 2500 orang	500 orang	500 orang	500,000,000	500 orang	500,000,000	500 orang	500,000,000	500 orang	500,000,000	500 orang	500,000,000
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM	Terlaksananya pembinaan kelembagaan koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terwujudnya Koperasi yang berkualitas kelembagaan dan usahanya											
			Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terselenggaranya pembinaan kelembagaan koperasi bagi 270 koperasi	270 koperasi	270 koperasi	150,000,000	270 koperasi	150,000,000	270 koperasi	150,000,000	270 koperasi	150,000,000	270 koperasi	150,000,000
			Penilaian Kesehatan Koperasi	Teridentifikasinya tingkat kesehatan koperasi sebanyak 300 koperasi	60 koperasi	60 koperasi	50,000,000	60 koperasi	60,000,000	60 koperasi	70,000,000	60 koperasi	80,000,000	60 koperasi	90,000,000
	Meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian kepada 750 orang	120 orang	150 orang	60,000,000	150 orang	70,000,000	150 orang	70,000,000	150 orang	80,000,000	150 orang	80,000,000

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian dan urusan Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TAHUNAN					KONDISI AKHIR RPJMD
			1	2	3	4	5	
1	Urusan Koperasi dan UKM							
1.1	Jumlah koperasi aktif (%)	68.34	70	71	72	73	74	75
1.2	Jumlah koperasi sehat (%)	48.59	50	51	52	53	54	55
1.3	Jumlah UMKM yang telah berijin usaha (unit)	5,672	6,239	6,863	7,549	8,304	9,134	10,047
2	Urusan Industri							
2.1	Pertumbuhan Industri (unit)	40,630	43,068	45,652	48,391	51,294	54,372	57,634
2.2	Jumlah Industri Kecil (Unit)	2,076	2,201	2,333	2,473	2,621	2,778	2,945
2.3	Industri Mikro (non formal) (unit)	38,473	40,781	43,228	45,822	48,571	51,486	54,575
2.4	Cakupan bina kelompok pengrajin (kelompok/unit)	493	523	554	587	622	660	699
3	Urusan Perdagangan							
3.1	Pameran / Ekspo (kali)	3	3	3	3	3	3	3
3.2	Eksport bersih perdagangan (US \$)	19,350,608	19,500,000	19,600,000	19,700,000	19,800,000	19,900,000	20,000,000
3.3	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal (Unit)	2,326	2,058	1,890	1,522	1,254	986	718

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 ini disusun dalam rangka mewujudkan rencana yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi yang akan dilaksanakan Tahun 2013 - 2018 oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2013 – 2018 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 sektor industri, perdagangan dan koperasi.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, arah dan acuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang industri, perdagangan dan koperasi Tahun 2013 – 2018 di Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Desember 2013
KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. DJOKO WIKANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630408 198810 1 002